

SKRIPSI

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI SARANA KEMANDIRIAN EKONOMI DESA DI DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG

Disusun Oleh :

NAMA : RIZKI CINTANA TRESNAMANSYAH
NPM : E. 1735223049
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam
Menyelesaikan Program Sarjana (S-1)
STIA Sebelas April Sumedang



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

2021

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) SEBELAS
APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

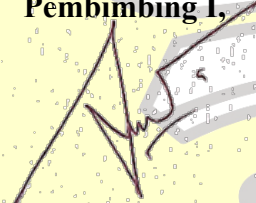
**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI
SARANA KEMANDIRIAN EKONOMI DESA DI DESA
CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN
SUMEDANG**


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Skripsi :

Pembimbing I,

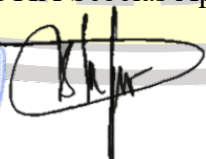
Pembimbing II,


Dr. H. Akadun, M.Pd
NIDN.00-3008-6401


Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si.
NIDN : 04-0111-8802

Mengetahui,
Ketua STIA Sebelas April Sumedang,




Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si.
NIDN: 04-3012-7102

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : RIZKI CINTANA TRESNAMANSYAH
NPM : E. 1735223049
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL PENELITIAN : PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI SARANA KEMANDIRIAN EKONOMI DESA DI DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG

Telah melakukan Ujian Skripsi di hadapan Panitia Penguji Ujian Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

Hari : Jum'at
Waktu : 08.00 - Selesai
Tanggal : 27 Agustus 2021

TELAH DINYATAKAN LULUS

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua Sidang : Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si ()

Sekretaris : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si ()

Pembimbing I : Dr. H. Akadun. M.Pd ()

Pembimbing II : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si ()

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

LEMBAR PENGESAHAN




NAMA : RIZKI CINTANA TRESNAMANSYAH
NPM : E. 1735223049
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL PENELITIAN : PERAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) SEBAGAI SARANA
KEMANDIRIAN EKONOMI DESA DI
DESA CIJERUK KECAMATAN
PAMULIHAN KABUPATEN
SUMEDANG

Telah melakukan Ujian Skripsi di hadapan Panitia Penguji Ujian Skripsi, Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

Hari : Jum'at
Waktu : 08.00 - Selesai
Tanggal : 27 Agustus 2021

TELAH DINYATAKAN LULUS

Tim Penguji Sidang Skripsi :

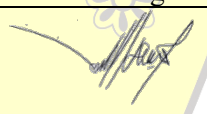


Penguji I : Edy Setiawan, S.Sos., M.Si ()
Penguji II : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si ()
Penguji III : Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si ()

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
SEBELAS APRIL SUMEDANG**

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

NAMA : RIZKI CINTANA TRESNAMANSYAH
NOMOR POKOK : E. 1735223049
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI SARANA KEMANDIRIAN EKONOMI DESA DI DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG

Telah dilakukan perbaikan sesuai saran dan koreksi Dosen Penguji pada Sidang Skripsi

No	Dosen Penguji	Materi Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Edi Setiawan, S.Sos., M.Si	Menambahkan materi mengenai potensi di Desa Cijeruk di BAB 1.	
2.	Lalas Sulastri S.Sos., M.Si	Tidak ada materi yang di perbaiki.	
3.	Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si	Tidak ada materi yang di perbaiki.	

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI SARANA KEMANDIRIAN EKONOMI DESA DI DESA CIJERUK KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG**” ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Sumedang, Agustus 2021
Yang membuat pernyataan,

RIZKI CINTANA TRESNAMANSYAH



**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) SEBELAS APRIL
SUMEDANG**

ABSTRAK

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI
KEMANDIRIAN EKONOMI DESA DI DESA CIJERUK KECAMATAN
PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG**

Disusun oleh:

NAMA : RIZKI CINTANA TRESNAMANSYAH

NOMOR POKOK : 1735223049

PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

**137 halaman, 5 bab, 64 tabel, 5 gambar, 4 lampiran
Daftar pustaka, 23 Buku dan 6 dokumen.**

BUMDes merupakan kebijakan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi desa. Oleh karena itu bagaimana mengetahui peran BUMDes di lapangan sangat penting, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Sarana Kemandirian Ekonomi Desa di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi Teknik penentuan informan penelitian, yaitu *purposive*. Dengan jumlah informan penelitian sebanyak 6 orang, yaitu Kepala Desa, ketua BPD, ketua BUMDes, Sekretaris BUMDes, Anggota BUMDes, dan Kasi UEM (Usaha Ekonomi Masyarakat) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BUMDes secara umum belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi dan kualitas sumberdaya manusia, dan belum juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan aset desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat. BUMDes memang telah berperan aktif dalam memperluas lapangan pekerjaan, tetapi belum nampak adanya kontribusi besar dalam memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Saran yang dapat diberikan yaitu agar meningkatkan pembinaan terhadap peran BUMDes, meningkatkan sumberdaya, Membuat strategi baru dalam mengembangkan usahanya.

Kata Kunci : Peran, BUMDes, Kemandirian, Ekonomi, Desa.

**HIGH SCHOOL OF ADMINISTRATIVE SCIENCE (STIA) ELECTION
APRIL SUMEDANG**

ABSTRACT

**THE ROLE OF VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES (BUMDES) AS
ECONOMIC INDEPENDENCE IN VILLAGE CIJERUK VILLAGE,
PAMULIHAN DISTRICT, SUMEDANG REGENCY**

Arranged by:

NAME : RIZKI CINTANA TRESNAMANSYAH

MAIN NUMBER : 1735223049

STUDY PROGRAM: STATE ADMINISTRATION SCIENCE

137 pages, 5 chapters, 64 tables, 5 pictures, 4 attachments

Bibliography 23 Books and 6 documents.

BUMDes is a government policy to move the village economy. Therefore, how to know the role of BUMDes in the field is very important, this research aims to find out the Role of Village Owned Enterprises (BUMDes) as a Means of Village Economic Independence in Cijeruk Village, Pamulihan District, Sumedang Regency.

The method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used are interviews, observation, literature study and documentation Research information collection techniques, namely purposive. With the number of research informants as many as 6 people, namely the Village Head, Head of BPD, Head of BUMDes, Secretary of BUMDes, BUMDes Members, and Head of UEM (Community Economics Business) Community and Village Empowerment Office of Sumedang Regency.

The results showed that the role of BUMDes in general had not been running well. This can be seen in increasing community welfare, developing the potential and quality of human resources, and has not been able to contribute to increasing village assets and increasing community income. BUMDes has indeed played an active role in employment, but there has not been a major contribution to employment for the community.

Suggestions that can be given are to improve guidance on the role of BUMDes, increase resources, and create new strategies developing development of owned Business Entities (BUMDes).

Keywords: *Role, BUMDes, Independence, Economic, Village.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Proposal Penelitian dengan judul “Pengaruh Koordinasi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang”.

Dalam penulisan skripsi Penelitian penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran yang membangun demi memperbaiki kualitas penulis dimasa yang akan datang.

Penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan laporan Proposal Penelitian. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak H. Yuyun Hidayat, Drs. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Sebelas April Sumedang.
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, S.Pd., M.Pd. Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
5. Yth. Ibu Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si. Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang.
6. Yth. Bapak Dr. H. Akadun M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Proposal Penelitian ini.
7. Yth. Ibu Lalas Sulastri S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Laporan Proposal Penelitian ini.

8. Yth. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang yang telah membekali ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Yth. Bapak Bastaman R. Darsono sebagai Kepala Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
10. Yth. Bapak Rohaendi S.Pd M.Pd sebagai ketua BPD Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
11. Yth. Seluruh Pegawai Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
12. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan moril maupun materil.
13. Rekan-rekan mahasiswa STIA Sebelas April Sumedang serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, Semoga segala bimbingan, bantuan, nasehat dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Sumedang, Agustus 2021

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG

Rizki Cintana T
NPM. E. 1735223049

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hakekat Administrasi.....	10
1. Pengertian Administrasi	10
2. Hakekat Administrasi Negara	11
3. Ruang Lingkup Administrasi Negara	12
4. Kaitan Administrasi dengan Variabel Penelitian	13
B. Organisasi	15
1. Hakekat Organisasi	14
2. Prinsip-Prinsip Organisasi.....	16
3. Tujuan Organisasi	18
4. Organisasi Non-Profit dan Organisasi Profit	19
a. Organisasi Non-Profit	19
b. Organisasi Profit	21

C. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Sarana	
Kemandirian Ekonomi Desa	22
1. Peran.....	22
a. Pengertian Peran.....	22
b. Jenis-Jenis Peran	24
2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	25
a. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	25
b. Maksud dan Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	27
c. Landasan dan Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	28
d. Syarat Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	29
e. Peluang dan Tantangan dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	30
D. Kajian Penelitian Terdahulu	31
E. Kerangka Pemikiran Dan Kisi-Kisi Penelitian	36
1. Kerangka Pemikiran.....	36
2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	44
B. Sasaran dan Informan Penelitian	49
1. Sasaran Penelitian	49
2. Informan Penelitian.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	51
D. Prosedur Pengolahan Data	52
E. Lokasi Dan Jadwal Penelitian.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53

1. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Cijeruk.....	53
a) Struktur Organisasi dan Uraian Tugas pada Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.....	56
1) Struktur Organisasi.....	56
2) Uraian Tugas dan Fungsi Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.....	57
(a) Kepala Desa.....	58
(b) Sekretariat Desa.....	59
(c) Seksi Pemerintahan	60
(d) Seksi Ekonomi	60
(e) Seksi Sosial	61
(f) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	61
B. Peran Seharusnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Kemandirian Ekonomi Desa	62
1) Kemandirian Ekonomi Desa	62
a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).....	62
b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	66
c. Pemanfaatan Sumber Daya.....	68
2) Pembangunan Ekonomi Desa	71
a. Tersedianya Fasilitas Usaha Desa	71
b. Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa.....	73
c. Memperluas Lapangan Pekerjaan	76
3) Sosial.....	78
a. Kesejahteraan Masyarakat.....	78
b. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.....	81
4) Pemberdayaan Masyarakat	83
a. Pengembangan Potensi dan Kualitas SDM	83
C. Peran Senyatanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Kemandirian Ekonomi Desa	87
1) Kemandirian Ekonomi Desa	86
a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).....	87

b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	90
c. Pemanfaatan Sumber Daya.....	92
2) Pembangunan Ekonomi Desa	94
a. Tersedianya Fasilitas Usaha Desa	94
b. Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa.....	97
c. Memperluas Lapangan Pekerjaan	99
3) Sosial.....	102
a. Kesejahteraan Masyarakat.....	102
b. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.....	104
4) Pemberdayaan Masyarakat	106
a. Pengembangan Potensi dan Kualitas SDM.....	106
D. Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan	
Kemandirian Ekonomi Desa	110
1) Kemandirian Ekonomi Desa	110
a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).....	110
b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	113
c. Pemanfaatan Sumber Daya Desa.....	115
2) Pembangunan Ekonomi Desa	118
a. Tersedianya Fasilitas Usaha Desa	118
b. Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa.....	120
c. Memperluas Lapangan Pekerjaan	122
3) Sosial.....	125
a. Kesejahteraan Masyarakat.....	125
b. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.....	127
4) Pemberdayaan Masyarakat	130
a. Pengembangan Potensi dan Kualitas SDM.....	130
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 2.2 Kisi-Kisi Pertanyaan Penelitian.....	38
Tabel 2.3 Pedoman Observasi	40
Tabel 2.4 Pedoman wawancara	42
Tabel 3.1 Penentuan Informan Penelitian	50
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	54
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Cijeruk Per-RW	55
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Item Nomor 1: Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)	64
Tabel 4.3 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 1 : Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).....	65
Tabel 4.4 Hasil Wawancara Item Nomor 2 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	66
Tabel 4.5 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 2 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	68
Tabel 4.6 Hasil Wawancara Item Nomor 3 : Pemanfaatan Sumber Daya	69
Tabel 4.7 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 3 : Pemanfaatan Sumber Daya.....	70
Tabel 4.8 Hasil Wawancara Item Nomor 4 : Tersedianya Fasilitas Usaha Desa	72
Tabel 4.9 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 4 : Tersedianya Fasilitas Usaha Desa	73
Tabel 4.10 Hasil Wawancara Item Nomor 5 : Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa	74
Tabel 4.11 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 5 : Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa.....	75

Tabel 4.12 Hasil Wawancara Item Nomor 6 : Memperluas lapangan pekerjaan	76
Tabel 4.13 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 6 : Memperluas lapangan pekerjaan	78
Tabel 4.14 Hasil Wawancara Item Nomor 7 : Kesejahteraan Masyarakat.....	79
Tabel 4.15 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 7 : Kesejahteraan Masyarakat.....	80
Tabel 4.16 Hasil Wawancara Item Nomor 8 : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	81
Tabel 4.17 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 8 : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.....	82
Tabel 4.18 Hasil Wawancara Item Nomor 9 : Pengembangan Potensi dan Kualitas SDM	83
Tabel 4.19 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 9 : Pengembangan Potensi dan Kualitas SDM	85
Tabel 4.20 Pengumpulan Data Fokus Satu.....	85
Tabel 4.21 Hasil Wawancara Item Nomor 10 : Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)	87
Tabel 4.22 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 10 : Meningkatkan PADes.....	89
Tabel 4.23 Hasil Wawancara Item Nomor 11 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	90
Tabel 4.24 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 11 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	92
Tabel 4.25 Hasil Wawancara Item Nomor 12 : Pemanfaatan Sumber Daya Alam berkelanjutan	93
Tabel 4.26 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 12 : Pemanfaatan Sumber Daya Alam berkelanjutan	94
Tabel 4.27 Hasil Wawancara Item Nomor 13 : Tersedianya Fasilitas Usaha Desa	95

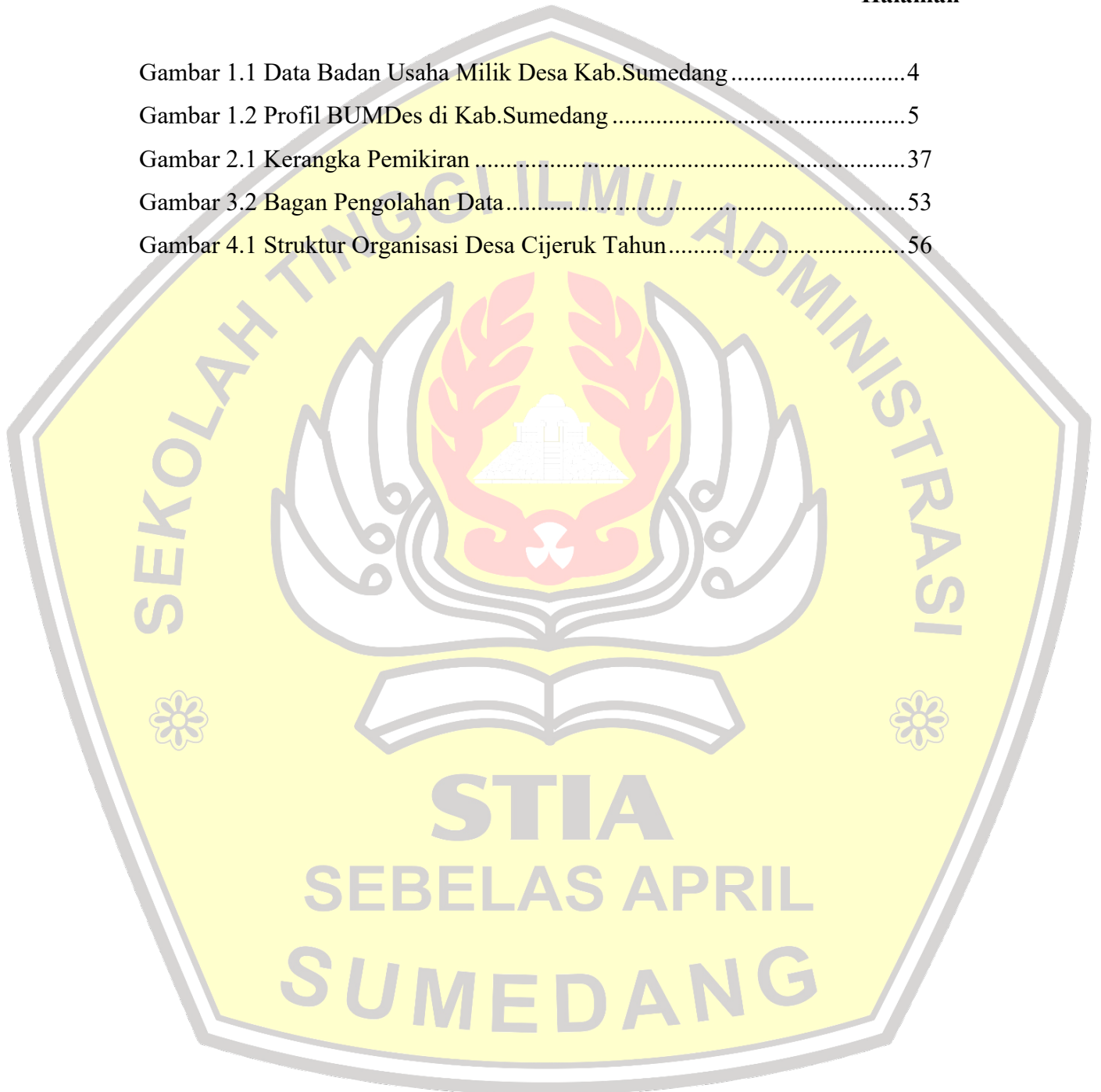
Tabel 4.28 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 13 : Tersedianya Fasilitas Usaha Desa	96
Tabel 4.29 Hasil Wawancara Item Nomor 14 : Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa	97
Tabel 4.30 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 14 : Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa.....	99
Tabel 4.31 Hasil Wawancara Item Nomor 15 : Memperluas Lapangan Pekerjaan	99
Tabel 4.32 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 15 : Memperluas Lapangan Pekerjaan.....	101
Tabel 4.33 Hasil Wawancara Item Nomor 16 : Kesejahteraan Masyarakat	102
Tabel 4.34 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 16 : Kesejahteraan Masyarakat.....	104
Tabel 4.35 Hasil Wawancara Item Nomor 17 : Peningkatan Pendapatan Masyarakat	104
Tabel 4.36 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 17: Peningkatan Pendapatan Masyarakat	106
Tabel 4.37 Hasil Wawancara Item Nomor 18 : Meningkatkan Potensi dan Kualitas SDM.....	107
Tabel 4.38 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 18 : Meningkatkan Potensi dan Kualitas SDM	108
Tabel 4.39 Pengumpulan Data Fokus Dua.....	109
Tabel 4.40 Hasil Wawancara Item Nomor 19 : Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)	111
Tabel 4.41 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 19 : Meningkatkan PADes.....	112
Tabel 4.42 Hasil Wawancara Item Nomor 20 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	113
Tabel 4.43 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 20 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	115
Tabel 4.44 Hasil Wawancara Item Nomor 21 : Pemanfaatan Sumber Daya ...	116

Tabel 4.45 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 21 : Pemanfaatan Sumber Daya.....	117
Tabel 4.46 Hasil Wawancara Item Nomor 22 : Tersedianya Fasilitas Usaha Desa	119
Tabel 4.47 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 22 : Tersedianya Fasilitas Usaha Desa	120
Tabel 4.48 Hasil Wawancara Item Nomor 23 : Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa	121
Tabel 4.49 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 23 : Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa	122
Tabel 4.50 Hasil Wawancara Item Nomor 24 : Memperluas Lapangan Pekerjaan	123
Tabel 4.51 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 24 : Memperluas Lapangan Pekerjaan.....	124
Tabel 4.52 Hasil Wawancara Item Nomor 25 : Kesejahteraan Masyarakat.....	126
Tabel 4.53 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 25 : Kesejahteraan Masyarakat.....	127
Tabel 4.54 Hasil Wawancara Item Nomor 26 : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	128
Tabel 4.55 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 26 : Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.....	129
Tabel 4.56 Hasil Wawancara Item Nomor 27 : Pengembangan Potensi dan Kualitas SDM	130
Tabel 4.57 Triangulasi Teknik Pengumpulan Data Pertanyaan Item Nomor 27 : Pengembangan Potensi dan Kualitas SDM	132
Tabel 4.58 Pengumpulan Data Fokus Tiga	132

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Data Badan Usaha Milik Desa Kab.Sumedang	4
Gambar 1.2 Profil BUMDes di Kab.Sumedang	5
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 3.2 Bagan Pengolahan Data	53
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Cijeruk Tahun	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Surat Keputusan Ketua STIA Sebelas April Sumedang Nomor: 0032/SK/D-STIA/UN/K/XI/2021 Tentang Penetapan Mahasiswa Penyusun Skripsi, Judul Skripsi, dan Dan Dosen Pembimbing Skripsi Tahun Akademik 2020/2021 Gelombang 2

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Izin Wawancara

Lampiran 4 : Pedoman Wawancara

Lampiran 5 : Pedoman Observasi

Lampiran 6 : Pedoman Dokumentasi

Lampiran 7 : Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 8 : Dokumentasi

Lampiran 9 : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dikuasai oleh desa dengan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat desa setempat. Sebagai suatu badan usaha, BUMDes tidak dapat dipungkiri bahwa tujuannya adalah mencari keuntungan. Keuntungan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, dan mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa.

Eksistensi BUMDes diakui secara yuridis dalam beberapa peraturan seperti dalam Undang-undang Desa, Undang-undang pemerintahan daerah dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (PDPT) Nomor 4 Tahun 2015. Sebagaimana yang telah dijelaskan keberadaan BUMDes tidak terlepas dari adanya pemerintahan Desa. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilatar belakangi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, serta adanya potensi sumber daya alam yang melimpah dan potensi sumber daya manusia yang kuat di desa sehingga perlu dilindungi, diberdayakan, dan terus dibangun untuk menjadi kuat,

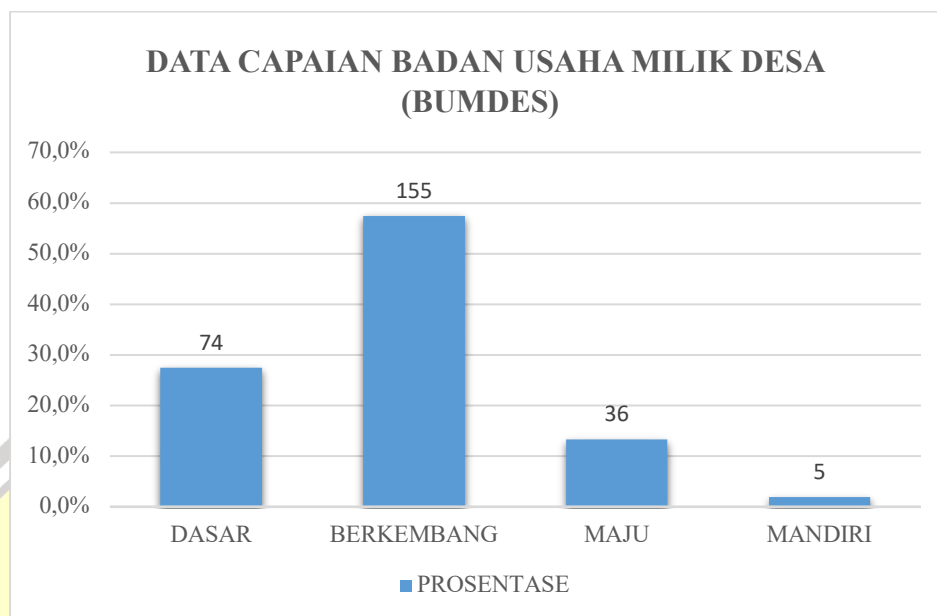
mandiri, dan maju seiring perkembangan zaman. Sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan untuk mengelola kekayaannya yang terdapat desa secara mandiri, salah satunya adalah dengan mendirikan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 undang-undang Desa.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 2014-2019 dibentuk program Nawa Cita yang artinya sembilan program prioritas pembangunan lima tahun kedepan, yang mana salah satu objeknya adalah desa. Desa sebagai salah satu objek pembangunannya, tercantum dalam poin ke-3 program, yaitu: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan dan poin ke-7 dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Program Nawa Cita ini dapat dikatakan sebagai penunjang tujuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam rangka membangun desa yang mandiri, kuat, dan maju. Pembangunan desa dan daerah tertinggal semakin gencar dilaksanakan sebagaimana fokus program Nawa Cita jilid II (2019-2024) yang terfokus pada pembangunan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terutama di daerah-daerah tertinggal dan wilayah desa. Artinya dalam program Nawa Cita jilid II (2019-2024) jika dihubungkan dengan BUMDes keduanya memiliki keterkaitan, karena melalui BUMDes program pembangunan

kompetensi sumber daya manusia di desa dapat terwujud, begitupun dengan tujuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan pernyataan di atas secara empiris di Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah populasi penduduk terbanyak di Indonesia pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah BUMDes yang signifikan mencapai angka 4.980 BUMDes dari total wilayah desa sebanyak 5.312 desa. Sekitar 200-300 unit BUMDes atau 7% total BUMDes di Jawa Barat memiliki omzet di atas dua ratus (200) juta pertahun, dan 614 unit diantaranya berstatus tidak aktif.

Sumedang merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten seperti Indramayu, Majalengka, Garut, Subang, Bandung, dan Bandung Barat. Yang mana wilayahnya terdiri dari 26 Kecamatan dan 270 Desa dengan potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang beragam di setiap wilayah, serta . Dari total jumlah BUMDes yang ada di Jawa Barat, ternyata 196 di antaranya adalah BUMDes yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang dan 74 Desa lainnya belum memebentuk BUMDes. Adapun Kualifikasi BUMdes di Kabupaten Sumedang yang sudah di tetapkan yaitu:

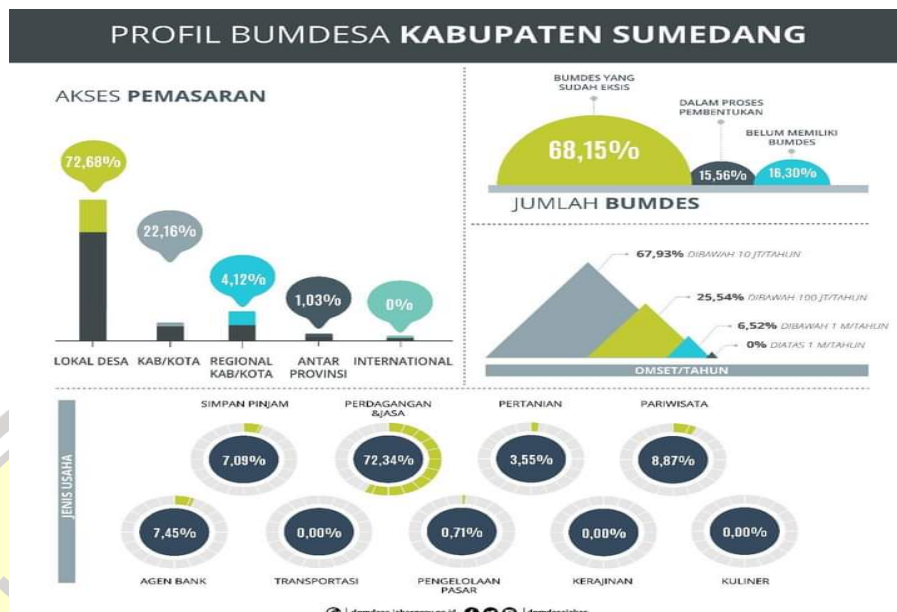


Gambar 1.1: Data Badan Usaha Milik Desa BUMDes di Kabupaten Sumedang.

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

Dapat disimpulkan dari data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terdapat 4 kategori yaitu, 74 badan usaha atau 27,4% berada di kategori dasar, 155 badan usaha atau 57,4% dalam kategori berkembang, kategori maju sebanyak 36 badan usaha atau 13,3%, dan kategori mandiri 5 badan usaha atau 1,9%.

Selain dari data capaian BUMDes di Kabupaten Sumedang, terdapat juga data profil BUMDes Kabupaten Sumedang yang menjelaskan mengenai akses pemasaran hingga jenis usaha yang dilakukan oleh setiap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berada di Kabupaten Sumedang.



Gambar 1.2: Profil BUMDes di Kabupaten Sumedang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Sumedang

Berdasarkan gambar dan data yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar desa di Kabupaten Sumedang telah membentuk BUMDes dengan sebagian besar jenis usahanya bergerak di bidang perdagangan dan jasa atau sebanyak 72.34% dan target pemasaran 72.68% dilakukan di Desa masing-masing.

Kecamatan Pamulihan adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang, terdiri dari 11 desa yang seluruhnya telah membentuk BUMDes, salah satunya adalah Desa Cijeruk. BUMDes Cijeruk dibentuk sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cijeruk Nomor 147/Kep.03/Des/ Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes Para Mitra dan kualifikasi masih berada pada level berkembang dikarenakan unit usaha yang ada masih mencari model kerja per-unit,

serta pembagian tugas masing-masing pengurusnya dan yang paling utama nilai IP-BUMDes kurang dari 50%. Kegiatan usaha BUMDes Para Mitra Cijeruk ini bergerak di bidang usaha produksi bongsang dan keranjang anyaman bambu untuk dipasarkan kepada para pengusaha tahu dan Ubi Cilembu di sekitar wilayah Kecamatan Pamulihan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMDes Para Mitra Cijeruk juga mengikutsertakan masyarakat setempat secara langsung. Selain usaha yang bergerak di bidang produksi. Desa Cijeruk sebenarnya memiliki potensi cukup besar untuk mengembangkan usahanya. Area persawahan, pertanian, hingga sumber daya manusia (SDM) adalah beberapa potensi yang ada dan dapat dikembangkan oleh BUMDes sehingga menjadi salah satu keunggulan yang ada.

Secara yuridis pembentukan BUMDes, struktur organisasi dan jenis kegiatan BUMDes Para Mitra Cijeruk Kecamatan Pamulihan sudah sesuai dengan Permen Desa PDTT (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Tetapi meskipun BUMDes Para Mitra Cijeruk secara pendirian, struktur organisasi dan jenis usahanya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun belum diiringi dengan kegiatan usaha yang jelas dan berkelanjutan. Dikatakan tidak jelas dan tidak berkelanjutan disini karena faktanya, BUMDes tersebut ada dan struktur organisasi serta kepengurusannya jelas, namun kegiatan

usahanya masih belum dilaksanakan secara terus menerus sehingga berakibat juga pada ketidakjelasan keuntungan yang diperoleh yang berdampak juga pada tidak optimalnya peran BUMDes sebagai sarana kemandirian ekonomi desa.

Berdasarkan hasil observasi sementara penulis, beberapa faktor yang menjadikan BUMDes Cijeruk kurang optimal diantaranya adalah:

1. Tidak adanya inovasi dari pemerintah desa untuk terus mengembangkan usaha BUMDes Para Mitra, hal ini terbukti dengan jenis usaha yang tidak pernah berkembang ataupun bertambah sejak tahun 2018 hingga saat ini. Padahal potensi yang ada di Desa Cijeruk cukup besar untuk mendukung BUMDes terus berkembang.
2. Kurangnya motivasi serta perhatian dari anggota, pengurus BUMDes, maupun pemerintah desa setempat dalam menjalankan kegiatan BUMDes. Baik itu berkaitan dengan pengelolaan maupun dari segi pendanaan.
3. Pemerintah desa kurang melakukan bimbingan atau pembinaan. Dilihat dari banyaknya penggerak BUMDes tidak mampu mengembangkan usahanya dan tidak ada unit usaha sebagai wadah untuk mengembangkan usahanya.

Dari latar belakang di atas dan permasalahan yang dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa

Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang dengan judul
**“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI
SARANA KEMANDIRIAN EKONOMI DESA DI CIJERUK
KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG”**

B. Fokus Permasalahan

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Peran apa yang seharusnya dimainkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana kemandirian Desa di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang?
2. Peran apa yang senyatanya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana kemandirian Desa di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana strategi meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana kemandirian Desa di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran apa yang seharusnya dimainkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana kemandirian Desa di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

2. Untuk mengetahui Peran apa yang senyatanya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana kemandirian Desa di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui strategi dalam meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana kemandirian Desa di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat memenuhi kegunaan sebagai berikut:

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana kemandirian ekonomi desa. Serta menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan ataupun aparaturnya yang berwenang.
2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis dalam menghadapi masalah yang ada. Serta menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam peram Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana kemandirian ekonomi desa di Desa Cijeruk Kecamatan pamulihan Kabupaten Sumedang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi

1. Pengertian Administrasi

Dalam suatu organisasi, administrasi merupakan suatu kegiatan yang berperan penting dalam mencapai tujuannya. Secara sempit administrasi merupakan proses menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, mengirim, serta menyimpan seluruh data yang digunakan dalam setiap organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Akadun (2011: 18) memberikan definisi administrasi secara sempit, yakni: “Administrasi diartikan sebagai pendayagunaan atau pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan keorganisasian”.

Sedangkan dalam arti luas dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya menurut Akadun (2011: 18) menyatakan bahwa: “secara luas administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan keorganisasian.

Selanjutnya menurut Liang Gie (Syafiie, 2010: 14) memberikan pengertian administrasi sebagai berikut: “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dirinci beberapa ciri pokok administrasi menurut Silalahi (2016: 10), yaitu:

1. sekelompok orang: kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang.
2. Kerjasama: kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang yang bekerja sama.
3. Pembagian tugas: kegiatan administrasi harus didasarkan dengan pembagian tugas/kerja.
4. Kegiatan yang berkesinambungan dalam suatu proses: kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan-tahapan tertentu secara berkesinambungan.
5. Tujuan: kegiatan administrasi merupakan sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerjasama.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi dalam arti luas adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan dengan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan menyediakan fasilitas usaha dalam kerjasama yang didasarkan rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2. Hakekat Administrasi Negara

Administrasi Negara merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti, tanpa adanya administrasi Negara, setiap pelaksanaan kegiatan baik pemerintahan maupun swasta tidak akan berjalan dengan baik.

Menurut Waldo (Iskandar, 2005: 18) mengemukakan pendapatnya bahwa: “Administrasi Negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu

administrasi negara merupakan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara”.

Pengertian lain dikemukakan oleh Winardi (2010: 33) memberikan pendapatnya yakni:

Administrasi Negara sebagai suatu sistem mempunyai tujuan untuk mewujudkan kebijakan negara, memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai sub sistem tugasnya meliputi seluruh kegiatan pelaksanaan dalam rangka mencapai tujuan yang mencakup semua faktor atau semua bidang.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, administrasi Negara merupakan organisasi yang memiliki tujuan dengan melakukan kegiatan kenegaraan untuk memecahkan segala persoalan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

3. Ruang Lingkup Administrasi Negara

Salah satu persoalan dalam beberapa paradigma administrasi negara seperti yang telah diuraikan dimuka ialah adanya usaha untuk membedakan antara negara (*public*) dalam istilah administrasi negara dengan swasta atau perusahaan (*private organization*). Ada sementara pihak yang menyatakan bahwa keduanya sulit dibedakan, dan ada pula yang menyatakan bahwa keduanya bisa dibedakan.

Penggunaan istilah negara dalam administrasi negara memberikan kesan seakan-akan administrasi negara tersebut tidak mencampuri urusan-urusan swasta.

Barangkali kalau diketahui ciri-ciri dari administrasi negara, maka persoalan tersebut akan bisa dijawab. Menurut Henry (Anggara 2018: 74) ciri-ciri tersebut adalah:

1. Kegiatan yang tidak bisa dihindari (*Unavoidable*), titik tekanannya yang mendasar adalah dalam hubungannya antara Negara dan Masyarakat bersifat pasti.
2. Monopoli untuk menggunakan wewenang dan kekuasaannya. Negara memiliki kewenangan untuk memaksakan kehendaknya pada masyarakat untuk menciptakan kepatuhan terhadap hukum, kekuasaan untuk melaksanakan paksaan dipahami sebagai *coercive power*, administrasi negara merupakan penjelmaan dari hal tersebut dapat diwujudkan dalam lembaga-lembaga negara, seperti kepolisian, kehakiman dan lainnya.
3. Prioritas, administrasi negara mengandung tanggung jawab moral untuk mensejahterakan masyarakat sehingga memiliki prioritas dalam memberikan arahan ataupun layanan.
4. Ukuran yang tidak terbatas, lingkup masyarakat dinegara meliputi batasan teritorial suatu negara, yang didalamnya terdapat administrasi negara.

4. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai sarana kemandirian ekonomi desa, yang merupakan kajian wilayah dari administrasi. Keberadaan BUMDes di desa-desa diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga perekonomian desa melalui program-program yang sesuai dengan potensi desa sehingga setiap tahunnya menuntut penyesuaian dalam sistem dan proses administrasi, dalam organisasi dan manajemen pemerintahan Negara.

Administrasi dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Administrasi erat hubungannya dengan salah satu tugas pemerintahan yaitu melayani kepentingan masyarakat. Keseluruhan kegiatannya mulai dari penentuan tujuan yang akan dicapai sampai kepada penyelenggaraan organisasi pemerintah yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah tanpa terkecuali untuk mencapai tujuan-tujuan Negara. Secara sederhana, administrasi

Negara adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik.

Berdasarkan rumusan mengenai administrasi Negara menurut Akadun (2011: 18) mengatakan bahwa “Administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi”. Selanjutnya White dalam Sukarna (1989: 14) mengemukakan: “Administrasi Negara terdiri dari semua/seluruh aktivitas/kegiatan yang bertujuan pemenuhan atau pelaksanaan kebijakan Negara.”

Setiap organisasi, instansi, atau individu memiliki peran dan fungsinya masing-masing di dalam sebuah Negara. Heranbudin (2015: 56), mendefinisikan peran (*role*) adalah tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam tindakan yang melibatkan orang lain. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, dan tanggung jawab yang menyertainya. Pendapat lain menurut Soekanto (2009: 212-213) mendefinisikan peran sebagai proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah organisasi yang didalamnya memuat proses yang ada dalam administrasi dan memiliki peran serta fungsinya dalam pemerintahan maupun untuk kepentingan publik lainnya.

Dari uraian-uraian pendapat di atas, dapat diketahui bahwa sebuah organisasi atau instansi publik dalam suatu negara itu memiliki peran dan

kedudukannya masing-masing. Administrasi merupakan ilmu kerjasama antar berbagai pihak, baik dalam lingkup internal maupun eksternal lingkungannya. Dengan kata lain berhasil atau tidaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana kemandirian ekonomi desa di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang tergantung kepada seluruh individu yang tergabung di dalam lingkungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

B. Organisasi

1. Hakekat Organisasi

Pada dasarnya setiap manusia memiliki keterbatasan dalam kemampuan, baik dari segi fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian. Sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan, mengingat terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia untuk membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab, maka terbentuklah kerjasama dan keterkaitan formal dalam suatu organisasi.

Organisasi berasal dari Bahasa Yunani "*organon*" yang berarti alat.

Adapun menurut para ahli, organisasi diartikan menurut Siagian (2014: 6) yaitu:

Setiap persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan dimana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Selanjutnya Hasibuan (2017: 5) memberikan pendapatnya bahwa:

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pendapat lain dikemukakan oleh Malinowski (dalam Fathoni, 2014: 22) mendefinisikan bahwa Organisasi sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas atau tugas umum, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan.

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja secara formal dalam tugas-tugas, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Prinsip-Prinsip Organisasi

Menurut Wursanto (2016: 219-220) menyatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang baik apabila organisasi itu memiliki prinsip-prinsip berikut:

1. Perumusan Tujuan Dengan Jelas
2. Prinsip Kesatuan Pemerintah
3. Prinsip Keseimbangan
4. Prinsip Pendistribusikan Pekerjaan
5. Prinsip rentangan Pengawasan
6. Prinsip Pelimpahan Wewenang
7. Prinsip Departementalisasi
8. Prinsip Penempatan Orang Yang Tepat
9. Prinsip Koordinasi
10. Prinsip Balas Jasa Yang Memuaskan

Sedangkan menurut Siagian (2014: 54) adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat tujuan yang jelas. Tanpa adanya tujuan yang jelas, organisasi dapat diumpamakan dengan sebuah kapal yang tidak mempunyai pelabuhan yang akan ditujunya.
2. Tujuan organisasi harus dapat dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi. Apabila setiap orang di dalam organisasi mengetahui

tujuan apa saja yang hendak dicapai organisasi ada beberapa hal yang dapat mereka laksanakan yaitu:

- a. Mereka mengetahui apa saja yang diharapkan oleh organisasi dari masing-masing.
 - b. Mereka dapat memahami apa saja yang dapat mereka harapkan dari organisasi.
 - c. Mereka dapat menilai apakah tujuan organisasi itu sinkron dengan tujuan mereka pribadi.
 - d. Jika belum sinkron, mereka dapat memutuskan apakah berusaha untuk mensinkronkan atau tidak, atau akan meninggalkan organisasi tersebut.
3. Tujuan organisasi harus dapat diterima oleh setiap orang dalam organisasi. Jika para anggota organisasi menilai tujuan yang hendak dicapai itu merupakan tujuan yang layak untuk dicapai, melalui mana tujuan mereka pribadipun akan tercapai pula, maka mereka akan lebih mudah untuk digerakkan memberikan pengorbanan-pengorbanan tertentu, baik dalam arti waktu, tenaga, keahlian dan kemampuan yang maksimal.
 4. Adanya kesatuan arah (*unity of direction*). Artinya bahwa semua kegiatan, semua sumber, semua pemikiran, keahlian, waktu, dan kemampuan ditujukan hanya kepada satu arah, yaitu pencapaian tujuan dengan cara yang seefisien dan seefektif mungkin.
 5. Adanya kesatuan perintah (*unity of command*). Hakiki dari pada prinsip ini adalah setiap orang bawahan hanya mempunyai seorang atasan langsung kepada siapa ia memberikan laporan dan pertanggungjawaban dan dari siapa ia menerima perintah, instruksi, bimbingan, dan pedoman kerja.
 6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab seseorang. Prinsip ini sangat penting karena wewenang yang sangat besar dari tanggung jawab sering memudahkan penyalahgunaan wewenang tersebut yang akibatnya akan merugikan organisasi.
 7. Adanya pembagian tugas (*distribution of workarti*). Organisasi dalam arti filosofis adalah manifestasi kemampuan manusia untuk bekerja secara kooperatif. Karenanya tugas-tugas yang terdapat di dalam organisasi harus dibagi-bagi sesuai dengan kemampuan, keahlian, dan bakat orang-orang di dalam organisasi.
 8. Struktur organisasi harus disusun secara sederhana dan kaya fungsi, sederhana disini mungkin berarti sesuai dengan kebutuhan dan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian.
 9. Pola dasar organisasi harus relative permanen. Meskipun struktur organisasi dapat dan memang harus dirubah-rubah sesuai dengan tuntutan perkembangan, kemajuan, kemunduran, sifat tugas yang lain, karena tujuan terpaksa dirubah atau oleh faktor-faktor lain, *flexibilitas* dalam penyesuaian itu harus jangan bersifat prinsipil.
 10. Adanya jaminan jabatan (*security of tenure*). Hal ini berarti bahwa kelompok pimpinan tidak boleh memperlakukan bawahannya dengan

semena-mena misalnya dalam bentuk pemecatan tanpa alasan yang kuat.

Tujuan merupakan suatu yang harus ada dan dimiliki oleh setiap manusia, baik itu tujuan hidup, tujuan bekerja dan tujuan-tujuan lainnya. Sama halnya dengan organisasi yang dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, karena tidak mungkin terbentuk suatu organisasi tanpa adanya tujuan.

3. Tujuan Organisasi

Organisasi sebagai aspek statis karena organisasi merupakan wadah yang berarti suatu tempat orang-orang yang bekerjasama. Sedangkan, organisasi sebagai dinamis merupakan suatu proses pembagian pekerjaan, sehingga dapat merealisasikan tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Tujuan substansif merupakan tujuan pokok organisasi yang menjadi sebab utama dibentuknya suatu organisasi. Oleh sebab itu, kegiatan organisasi diarahkan pada 2 dimensi fungsi menurut Silalahi (2007: 128) sebagai berikut:

1. Tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien;
Keefektifan adalah yang berhubungan dengan tujuan organisasi baik secara eksplisit maupun implisit. Efisiensi adalah berhubungan dengan rasio *output* dan *input* atau keuntungan dan biaya.
2. Tercapainya kepuasan dari anggota organisasi;
Setiap orang atau anggota organisasi yang bekerja atau terlibat dalam aktivitas organisasi harus diberikan kepuasan, sehingga mereka merasa sebagai anggota organisasi, dan hal ini akan mendorong orang tersebut untuk bekerja dalam kondisi dan motivasi yang produktif.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa tujuan organisasi merupakan arah atau sesuatu yang ingin dicapai atau dipengaruhi yang menjadi sebab dilaksanakannya suatu kegiatan.

d. Organisasi Non-Profit dan Organisasi Profit

a. Organisasi Non-Profit

Organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Menurut PSAK No.45 bahwa “organisasi nirlaba/Non Profit memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut”. (IAI, 2010: 45)”

Sedangkan berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang

Yayasan, yayasan adalah :

“Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Pendapat lain dari Lilis Setiawati, (2011 : 175) menyebutkan bahwa:

“Organisasi nirlaba merupakan satu organisasi sosial yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Fokus dari visi dan misi organisasi nirlaba adalah pelayanan kepada

masyarakat, seperti yayasan pendidikan, LSM, organisasi keagamaan, panti asuhan, panti wredha dan sebagainya.”

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Organisasi Nirlaba itu adalah organisasi sosial yang didirikan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk kepentingan umum atau bersama tanpa bertujuan untuk memperoleh laba.

Organisasi Non Profit mempunyai misi melayani publik dan konsumennya lebih terbatas sedangkan organisasi profit mempunyai motif untuk mencari untung, yaitu hanya melayani konsumen yang dapat memberikan keuntungan. Apabila dari suatu kelompok konsumen tidak akan diperoleh keuntungan maka organisasi bisnis umumnya tidak bersedia melayani (Salusu, 2010:47).

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
2. Menghasilkan barang dan/ atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus Kembali , atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas.

b. Organisasi Profit

Organisasi Profit adalah Suatu proses/bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama yakni untuk menghasilkan laba. Organisasi ini menyediakan atau menghasilkan barang maupun jasa guna untuk memperoleh hasil ataupun laba sesuai dengan keinginan pemilik organisasi tersebut. Atau bisa juga dikatakan bahwa Organisasi profit merupakan satu kesatuan usaha (single entity) yang utuh pada organisasi-organisasi yang berorientasi laba.

Pada organisasi yang berorientasi laba, jangka waktu kegiatan operasional suatu perusahaan akan dapat diketahui melalui anggaran dasar yang telah dibuatnya. Selain itu, organisasi ini dapat sewaktu-waktu dapat dibubarkan (dikukudasi) apabila ternyata tidak dapat lagi memperoleh keuntungan dan terus-menerus menderita kerugian sehingga modalnya menjadi sangat berkurang.

Bentuk organisasi profit sangat beragam, di antaranya yaitu perusahaan publik, perusahaan swasta, dan perusahaan milik pemerintah (Negara/daerah/desa). Bentuk organisasi profit di wilayah perusahaan pemerintah salah satunya ada di desa, dengan dibentutuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Organisasi ini di bentuk dan di kembangkan untuk mencari keuntungan atau laba dari usaha yang dilakukannya. Sehingga, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini bisa disebut sebagai orgaisasi profit/*profit oriented* karena dalam tugas dan fungsinya di tunjukan untuk mencari keuntungan atau laba yang berada dalam sistem pemerintahan desa dan merupakan wilayah dari pemerintahan.

C. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Sarana Kemandirian Ekonomi Desa

1. Peran

a. Pengertian Peran

Peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang yang menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa didalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Herabudin (2010: 56), mendefinisikan peran (role) adalah tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam tindakan yang melibatkan orang lain. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, dan tanggung jawab yang menyertainya.

Menurut Soekanto (2009: 212-213), peran sebagai proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya begitupun sebaliknya.

Sedangkan menurut Merton (dalam Raho 2007: 67) mengatakan bahwa:

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan kedudukan seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dari harapan-harapan masyarakat yang nanti harus mempertanggungjawabkan perannya tersebut.

Sedangkan Levinson (dalam Soekanto 2009: 11) mengatakan peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat.

Levinson (dalam Soekanto 2009: 11) Struktur peran terbagi menjadi dua bagian, diantaranya yaitu:

- a) Peran Formal (Peran yang Nampak Jelas)
Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen, peran formal yang standar terdapat dalam keluarga
- b) Peran Informal (Peran Tertutup)
Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

b. Jenis-Jenis Peran

Menurut Mintzberg (dalam Thoha, 2012: 21) mengemukakan bahwa ada jenis tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu:

1. Peran antar pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Peranan ini oleh Mintzberg dibagi atas tiga peranan yang merupakan perincian lebih lanjut dari peranan antar pribadi ini. Tiga peranan ini dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Peranan sebagai tokoh (*Figurehead*), yakni suatu peranan yang dilakukan mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan personalan yang timbul secara formal.
 - b. Peranan sebagai pimpinan (*Leader*), dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotifasi, mengembangkan, dan mengendalikan.
 - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.
2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal di atas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi. Peranan interpersonal di atas Mintzberg merancang peranan kedua yakni yang berhubungan dengan informasi ini. Peranan itu terdiri dari peranan-peranan sebagai berikut:
 - a. Peran pemantau (*Monitor*), peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Adapun informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut:
 - 1) *Internal operations*, yakni informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerja didalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - 2) peristiwa-peristiwa diluar organisasi (*external events*), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari luar organisasi, misalnya informasi dari langganan, hubungan-hubungan pribadi, pesaing-pesaing, asosiasi-asosiasi dan semua informasi mengenai perubahan atau perkembangan ekonomi, politik dan teknologi, yang semuanya itu amat bermanfaat bagi organisasi.
 - 3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang berasal dari bermacam-macam sumber sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.

- 4) Buah pikiran dan kecenderungan, atasan memerlukan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecenderungan-kecenderungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan memperelajari tentang ide-ide atau buah pikiran yang baru.
- 5) Tekanan-tekanan, atasan perlu juga mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu.
- b. Sebagai desiminotor, peranan ini melibatkan atasan untuk mengenai proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpin
- c. Sebagai juru bicar (*Spokesman*), peranan ini dinamakan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasi.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang di pimpinnya. Mintzberg berkesimpulan bahwa pembagian besar tugas atasan pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan ini disebabkan karena:
 - a. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan terlibat untuk memikirkan tindakan-tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya.
 - b. Sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan yang terbaru dan nilai-nilai organisasi.
 - c. Keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya.

Dapat disimpulkan dari jenis-jenis peranan di atas bahwa peran atasan harus bertindak sebagai tokoh serta harus terlibat dalam proses pembuatan strategi dan program di dalam organisasi tersebut agar organisasi berjalan dengan lancar.

2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Seyadi (2003:16) peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa
5. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutny BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Landasan Dasar Hukum BUMDes, Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

- a. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) "*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*"
- b. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebuah badan atau organisasi milik pemerintah desa yang didalamnya memiliki peran untuk membangun, mengembangkan,

memberdayakan, serta memperkokoh perekonomian yang ada di masyarakat dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat.

b. Maksud dan Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Purnomo (2004:17-18), maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai berikut: Maksud pembentukan Badan Usaha Milik Desa antara lain:

1. Menumbuh kembangkan perekonomian desa.
2. Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Desa.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa.
4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.

Adapun beberapa Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) antara lain:

1. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
2. Menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa;
3. Menumbuhkembangkan usaha sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja masyarakat di desa;
4. Meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.

c. Landasan dan Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Landasan Dasar Hukum BUMDes Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah sebagai berikut:

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1)

“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi”

2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:

Pasal 78

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

2. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

1. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal.

2. 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

3. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Desa;
 - b. Tabungan masyarakat;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - d. Pinjaman; dan/atau;
 - e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
4. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 80

1. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD

Pasal 81

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan.
2. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan.
3. Daerah Kabupaten/Kota.

d. Syarat Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan

Usaha Milik Desa Pasal 5 ayat (1) Syarat Pembentukan BUMDES:

- a. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. Tersedianya sumber daya ddesa yang belum dimanfaatkan optimal, terutama kekayaan desa;
- e. Tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang di kelola secara persial dan kurang rekomendasi; dan
- g. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

e. Peluang Dan Tantangan dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Ibrahim (2018:6-8) Adanya sumber-sumber yang masuk pada wilayah pedesaan dapat menjadi peluang dan dimanfaatkan sebagai sumber baru yang bernilai ekonomi diantaranya:

- a. Banyak layanan publik yang belum disediakan pemerintah dapat dijadikan peluangh bagi desa untuk mendirikan BUMDes, seperti listrik PLN yang belum masuk desa dapat dijadikan BUMDes sebagai wahana baru dengan memanfaatkan sumber mata air sebagai tenaga listrik mikro hidro, ataupun dengan memanfaatkan diesel. Meskipun kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan namun dapat disikapi dengan pengurusan izin kepada pemerintah.
- b. Masuknya program-program pemerintah yang bersifst menjuar barang-barang bersubsidi seperti raskin, pupuk bersubsidi. Dengan adanya barang-barang subsidi yang dijualkepedesaan, membuka peluang bagi warga desa ntuk membuka BUMDes usaha distribusi raskin maupun pupuk bersubsidi di usaha tersebut justru akan membuat masyarakat akan turut mengawasi jalannya pelaksanaan distribusi barang/jasa yang ada dalam pengawasan pemerintah.
- c. Terbatasnya warga masyarakat mengakses sumber-sumber perbankan, menjadi pelung bagi desa membuka usaha simpan pinjam, bahkan kredit usaha yang pernah digulirkan pemerintah dan saat ini macet, dapat menjadi peluang bagi desa dengan menawarkan jasa penagihan yang dananya kemudian dapat digulirkan kembali. Tentunya peluang ini diikuti dengan mekanisme penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMDes.

Selain potensi dan peluang, Ibrahim (2018:7-8) mengemukakan bahwa ada beberapa hambatan/tantangan yang perlu diwaspadai dan disikapi BUMDes kedepannya.

- a. Bagi BUMDes yang bergerak di bidang simpan pinjam akan menghadapi tantangan macetnya pinjaman seperti yang saat dihadapi pemerintah dalam menyalurkan kredit usaha rakyat.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia pelaku BUMDes harus segera disikapi dengan bimbingan teknis dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan pelayanan.
- c. Banyaknya perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang bergerak di bidang usaha yang sama dimungkinkan akan menjadi pesaing utama BUMDes kalau layanan BUMDes lebih buruk dari layanan perusahaan lain, maka dimungkinkan berpalingnya pelanggan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan usaha yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut penelitian perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam penyusunan penelitian ini penulis terlebih dahulu menggunakan penelitian terdahulu berupa skripsi yang sesuai dengan judul yang peneliti ajukan,

hal tersebut bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun dan mempertimbangkan penyusunan proposal skripsi.

Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Yulianti. Peran Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang 2020.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Tahun Penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian kualitatif 2. Variabel peranan 	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Dinas kesehatan telah melakukan peran dalam penanggulangan HIV/AIDS dalam hal pencegahan dan penanggungan, tetapi masih kurang dalam mengoptimalkan peran dan dukungan masyarakat terutama populasi kunci yang mana menurut keterangan informan belum bersedia melakukan pemeriksaan maupun pengobatan yang seharusnya.
2.	Abid Muhtarom. Peranan lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan. Univeristas Islam Lamongan 2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Tahun penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian kualitatif 2. Variabel peranan 	Hasil penelitian secara keseluruhan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas pelaksanaan peran dan fungsi LPM dalam pembangunan desa pada umumnya. Dalam merealisasikan

				<p>tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuannya dan keteampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.</p>
3.	<p>Haryadi. 2018. Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelataran di Desa Matang Lama Kecamatan Malang Kabupaten Bintan 2015). Tanjungpinang: Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Penelitian 2. Tahun Penelitian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode penelitian Kualitatif 2. Variabel peranan 	<p>Hasil penelitian Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Manatang lama sudah berjalan dengan baik, kepala desa selaku pemerintah desa telah menjalankan peranannya sesuai dengan tugas, wewenang dan perannya sebagai kepala desa dalam meningkatkan kegiatan kegiatan atau program pembangunan desa yang sudah berjalan hingga saat ini. Kepala desa harus mampu melaksanakan dan</p>

				siap dengan masukan-masukan dan aspirasi masyarakat yang ada di desa Mantang Lama, agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa dapat meningkatkan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari ketiga penelitian terdahulu sebagaimana telah disebutkan di atas dapat penulis simpulkan bahwa Peran sebuah organisasi, lembaga, program maupun peran seorang pemimpin ini perlu diteliti, mengingat masih adanya permasalahan yang disebabkan oleh peran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebagaimana mestinya. Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan beberapa persamaan dan perbedaannya. Persamaan penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada salah satu variabel yang digunakan dalam membahas pokok permasalahan, yaitu variabel Peran, sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah pada kaitan pembahasan Peran itu sendiri yang membahas mengenai kemandirian suatu badan usaha milik desa. Selain itu, yang membedakan dengan kajian terdahulu di atas adalah terdapat pada paradigma penelitian, dimana penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme yang dimana dalam proses penelitiannya berdasarkan dari hasil penelitian observasi artinya pada pelaksanaan penelitian ini tidak berdasarkan teori dan lebih cenderung pada hasil observasi lapangan.

Adanya persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian terdahulu, tentunya membawa konsekuensi pada hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian sebelumnya ditujukan untuk memperoleh gambaran/deskriptif variabel itu sendiri (variabel Peran) beserta dengan indikator-indikator dilingkup organisasi pemerintahan dan pejabat pemerintahan, maka penelitian ini diharapkan untuk menghasilkan gambaran tentang Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan usaha milik pemerintah dalam hal ini pemerintah desa.

Paradigma penelitian yang peneliti gunakan adalah paradigma konstruktivisme. Dimana dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti mendapatkan beberapa hambatan, diantaranya:

1. Tidak adanya teori yang spesifik atau berfokus mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Kemandirian Ekonomi Desa.
2. Tidak adanya dasar teori atau pendapat yang dijadikan tolak ukur untuk membuat kisi-kisi pertanyaan atau pedoman wawancara, sehingga peneliti melakukan observasi lapangan dalam membuat kisi-kisi pertanyaan untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Kemandirian Ekonomi Desa.
3. Kurangnya reverensi yang ada sehingga membuat peneliti melakukan observasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan data dan informasi sebagai acuan yang dijadikan bahan penelitian.

E. Kerangka Pemikiran dan Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

1. Kerangka Pemikiran

Didalam inti administrasi adanya organisasi, roda organisasi akan berjalan secara dinamis apabila manajemen didalam organisasi itu sendiri diterapkan dengan baik. Dengan bekerjasama, maka pekerjaan akan terasa lebih ringan. Selain itu pekerjaan atau tugas akan lebih cepat terselesaikan dibandingkan dengan hanya bekerja seorang diri.

Organisasi memiliki peran dan fungsinya masing-masing, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme dimana peneliti menggunakan hasil observasi dalam menjawab fokus permasalahan. Untuk menjawab berbagai fokus permasalahan peneliti telah menyusun berbagai pertanyaan untuk mengetahui:

1. Peran apa yang seharusnya dimainkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana kemandirian Desa di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
2. Peran apa yang senyatanya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana kemandirian Desa di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

3. Strategi meningkatkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sarana kemandirian Desa di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

Dari Uraian di atas maka kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah Peneliti, 2021

2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2
Kisi-Kisi Pertanyaan Penelitian

Fokus Permasalahan	Dimensi	Indikator	Item	
Peran Seharusnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Sarana Kemandirian Ekonomi Desa.	1. Kemandirian Ekonomi Desa	a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).	1	
		b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	2	
		c. Pemanfaatan Sumber Daya Desa.	3	
	2. Pembangunan Ekonomi Desa	a. Tersedianya Fasilitas Usaha Desa.	4	
		b. Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa.	5	
		c. Memperluas Lapangan Pekerjaan.	6	
	3. Sosial	a. Kesejahteraan Masyarakat.	7	
		b. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.	8	
	4. Pemberdayaan Masyarakat	a. Pengembangan Potensi dan kualitas SDM.	9	
	Peran Senyatanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Sarana Kemandirian Ekonomi Desa	1. Kemandirian Ekonomi Desa	a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)	10
			b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	11
			c. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Berkelanjutan.	12
2. Pembangunan Ekonomi Desa		a. Tersedianya Fasilitas Usaha Desa.	13	
		b. Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa.	14	

		c. Memperluas Lapangan Pekerjaan.	15
	3. Sosial	a. Kesejahteraan Masyarakat.	16
		b. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.	17
	4. Pemberdayaan Masyarakat	a. Meningkatkan Potensi dan Kualitas SDM.	18
Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa.	1. Kemandirian Ekonomi Desa	a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).	19
		b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.	20
		c. Pemanfaatan Sumberdaya Alam Berkelanjutan.	21
	2. Pembangunan Ekonomi Desa	a. Tersedianya Fasilitas Usaha Desa.	22
		b. Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa	23
		c. Memperluas Lapangan Pekerjaan.	24
	3. Sosial	a. Kesejahteraan Masyarakat.	25
		b. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.	26
4. Pembedayaan Masyarakat	a. Meningkatkan Potensi dan Kualitas SDM	27	

Tabel 2.3

Pedoman Observasi

No	Pedoman Observasi	Hasil Observasi
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).	BUMDes berhasil meningkatkan PADes Cijeruk
2.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Bumdes menyediakan lapangan kerja serta usaha baru
3.	Pemanfaatan Sumber Daya Desa.	Pemanfaatan gedung serbaguna dengan cara sewa
4.	Tersedianya Fasilitas Usaha Desa.	Bumdes menciptakan fasilitas usaha desa, dimana produk yang dijual menjadi sumber pendapatan baru
5.	Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa.	Bumdes sedikit banyak menyumbang kontribusi dalam peningkatan asset/kekayaan desa
6.	Memperluas Lapangan Pekerjaan.	BUMDes telah membantu memperluas lapangan pekerjaan
7.	Kesejahteraan Masyarakat.	BUMDes belum dapat sepenuhnya memaksimalkan peran untuk kesejahteraan masyarakat
8.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.	BUMDes belum sepenuhnya dapat berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat karena minimnya keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes
9.	Pengembangan Potensi dan kualitas SDM.	BUMDes telah melakukan pelatihan dan bimtek bagi pengelola BUMDes dengan tujuan meningkatkan kualitas serta potensi SDM
10.	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).	BUMDes tidak dapat meningkatkan PADes walau sebelumnya telah berjalan sejak tahun 2018, dimana belum ada hasil keuntungan yang signifikan untuk meningkatkan PADes Cijeruk. Terlebih, terhitung sejak realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan DD (Dana Desa), serta PBH alokasinya di alihkan ke program prioritas alokasi Dana Desa yang diakibatkan pandemi COVID-19.
11.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat.	BUMDes Cijeruk sudah dapat merangkul sebagian usaha kecil masyarakatnya walau pada saat ini masih terkendala akibat permodalan dan masih lemahnya kualitas sumber daya manusia pengelola BUMDesnya.
12.	Pemanfaatan Sumber Daya Desa.	BUMDes tidak memiliki gedung serbaguna
13.	Tersedianya Fasilitas Usaha Desa.	BUMDes Cijeruk belum dapat berperan

		untuk tersedianya fasilitas usaha desa
14.	Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa.	Keberadaan BUMDes belum dapat meningkatkan asset/kekayaan desa
15.	Memperluas Lapangan Pekerjaan.	BUMDes melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus menandakan bahwa BUMDes telah memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa
16.	Kesejahteraan Masyarakat.	BUMDes telah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
17.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.	BUMDes mengalami kendala dimana BUMDes tidak berjalan secara optimal untuk mencapai tujuannya. Hal ini berdampak tidak menghasilkan profit dan BUMDes tidak berkontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat
18.	Pengembangan Potensi dan kualitas SDM.	BUMDes tidak melakukan kegiatan untuk meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia baik bagi pengelola maupun masyarakat diluar pengelola
19.	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADES).	Untuk saat ini belum ada strategi khusus yang dilakukan BUMDes dalam upaya meningkatkan PADES
20.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat.	BUMDes hanya baru menjalin kerjasama bersama pelaku usaha mikro dengan menjalin kemitraan namun belum maksimal pengelolaannya
21.	Pemanfaatan Sumber Daya Desa.	Tidak ada gedung serbaguna, jadi BUMDes tidak dapat mengambil manfaat dari sumber daya tersebut
22.	Tersedianya Fasilitas Usaha Desa.	BUMDes belum sepenuhnya dapat berkontribusi agar tersedianya fasilitas usaha desa
23.	Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa.	BUMDes belum dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan aset dan kekayaan desa
24.	Memperluas Lapangan Pekerjaan.	BUMDes telah melakukan strategi, namun belum mendapat hasil yang diharapkan
25.	Kesejahteraan Masyarakat.	BUMDes telah menampung beberapa produk yang dihasilkan masyarakat
26.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.	BUMDes memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha terutama pengrajin yang minim fasilitas pemasaran untuk dapat dipasarkan melalui BUMDes
27.	Pengembangan Potensi dan kualitas SDM.	Pelatihan dan bimtek belum sepenuhnya berdampak bagi meningkatnya kualitas SDM

Tabel 2.4
Pedoman Dokumentasi

No	Pedoman Dokumentasi	Hasil Dokumentasi
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).	Terdapat dokumentasi tentang PADes pada tahun 2019 dan tahun 2020, dan buku akun BUMDes
2.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Terjadi peningkatan jumlah anggota bumdes serta mitra di lapangan pada tahun 2019 ke tahun 2020
3.	Pemanfaatan Sumber Daya Desa.	Terdapat dokumentasi dan akun sewa gedung serbaguna
4.	Tersedianya Fasilitas Usaha Desa.	Terdapat dokumentasi produk yang menjadi nilai jual
5.	Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa.	Terdapat dokumentasi Buku asset/kekayaan BUMDes untuk Desa Cijeruk
6.	Memperluas Lapangan Pekerjaan.	Terdapat dokumentasi daftar mitra BUMDes Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan
7.	Kesejahteraan Masyarakat.	Terdapat dokumentasi income perkapita tahun 2019-2020 dalam pembukuan keuangan BUMDes
8.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.	BUMDes harus bergerak dalam pelatihan-pelatihan, kaderisasi, bimtek dan pelatihan bagi calon pengelola BUMDes.
9.	Pengembangan Potensi dan kualitas SDM.	Terdapat dokumentasi Pelatihan dan bimtek bagi pengelola BUMDes
10.	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).	Terdapat dokumentasi Peraturan Desa Cijeruk tentang Perubahan APBDes Cijeruk Tahun 2020
11.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Terdapat dokumentasi daftar mitra BUMDes Cijeruk.
12.	Pemanfaatan Sumber Daya Desa.	Terdapat dokumentasi asset Desa
13.	Tersedianya Fasilitas Usaha Desa.	Terdapat dokumentasi Rancangan perubahan APBDes Cijeruk Tahun 2021
14.	Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa.	Terdapat dokumentasi mengenai omset BUMDes dalam 2 tahun terakhir
15.	Memperluas Lapangan Pekerjaan.	Terdapat dokumentasi tentang struktur kepengurusan BUMDes dan Daftar mitra BUMDes
16.	Kesejahteraan Masyarakat.	Terdapat dokumentasi daftar mitra BUMDes
17.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.	Terdapat dokumentasi kegiatan BUMDes yang tidak berjalan dalam agenda kegiatan BUMDes
18.	Pengembangan Potensi dan kualitas	Terdapat dokumentasi kegiatan BUMDes

	SDM.	yang tidak berjalan dalam agenda kegiatan BUMDes
19.	Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).	Terdapat dokumentasi dalam Buku akun BUMDes
20.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Terdapat dokumentasi daftar mitra BUMDes
21.	Pemanfaatan Sumber Daya Desa.	Terdapat dokumentasi Buku asset Desa
22.	Tersedianya Fasilitas Usaha Desa.	Terdapat dokumentasi daftar unit usaha BUMDes
23.	Meningkatkan Aset/Kekayaan Desa.	Terdapat dokumentasi dalam grafik capaian BUMDes
24.	Memperluas Lapangan Pekerjaan.	Terdapat dokumentasi jenis usaha yang dijalankan BUMDes Cijeruk
25.	Kesejahteraan Masyarakat.	Terdapat dokumentasi produk yang dipasarkan
26.	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.	Terdapat dokumentasi produk yang dipasarkan dan bagi hasil
27.	Pengembangan Potensi dan kualitas SDM.	Terdapat dokumentasi pelatihan dan bimtek BUMDes



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian berkaitan dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah diartikan sebagai sebuah kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2017: 9) mengemukakan pengertian tentang penelitian kualitatif sebagai berikut:

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian kualitatif ini digunakan karena dianggap lebih mudah dalam menyesuaikan dengan kenyataan-kenyataan yang dihadapi di lapangan. Menurut Bogdan dan Bikle yang dikutip oleh Sugiyono (2017:13), memiliki sejumlah karakteristik tertentu. adapun ciri-ciri penelitian kualitatif sebagai berikut:

- 1) *Qualitative research has the natural setting as the direct source of data and researcher is the key instrument.* (Dilakukan dalam kondisi

yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci)

- 2) *Qualitative research is descriptive. The data collected is in the form of words of pictures rather than number.* (Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka).
- 3) *Qualitative research are concerred with process rathe than simply with outcomes of product.* (Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome).
- 4) *Qualitative research tend to analyze their data inductively.* (Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif).
- 5) *“Meaning” is of essential to the qualitative approach.* (Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati)).

Penelitian kualitatif menurut Molcong (2015: 4-13) memiliki sejumlah karakteristik tertentu. Adapun ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain sebagai berikut:

- 1) Latar Alamiah;
- 2) Manusia sebagai Alat (*Instrument*);
- 3) Metode kualitatif;
- 4) Analisis data secara induktif;
- 5) Teori dan dasar (*Grounded theory*);
- 6) Deskriptif;
- 7) Lebih mementingkan proses dari pada hasil;
- 8) Adanya “batas” yang ditemukan oleh “fokus”;
- 9) Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data;
- 10) Desain yang bersifat sementara, hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka peneliti kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Desain penelitian ini yang diamati adalah Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Sarana Kemandirian Ekonomi Desa di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang didapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016: 205), yaitu bahwa:

Dengan digunakannya metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penggunaan metode kualitatif ini, bukan karena metode ini baru dan lebih *'trendy'*, tetapi memang permasalahan lebih tepat dicarikan jawabannya dengan metode kualitatif.

Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian dapat diperoleh data yang lebih tuntas, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

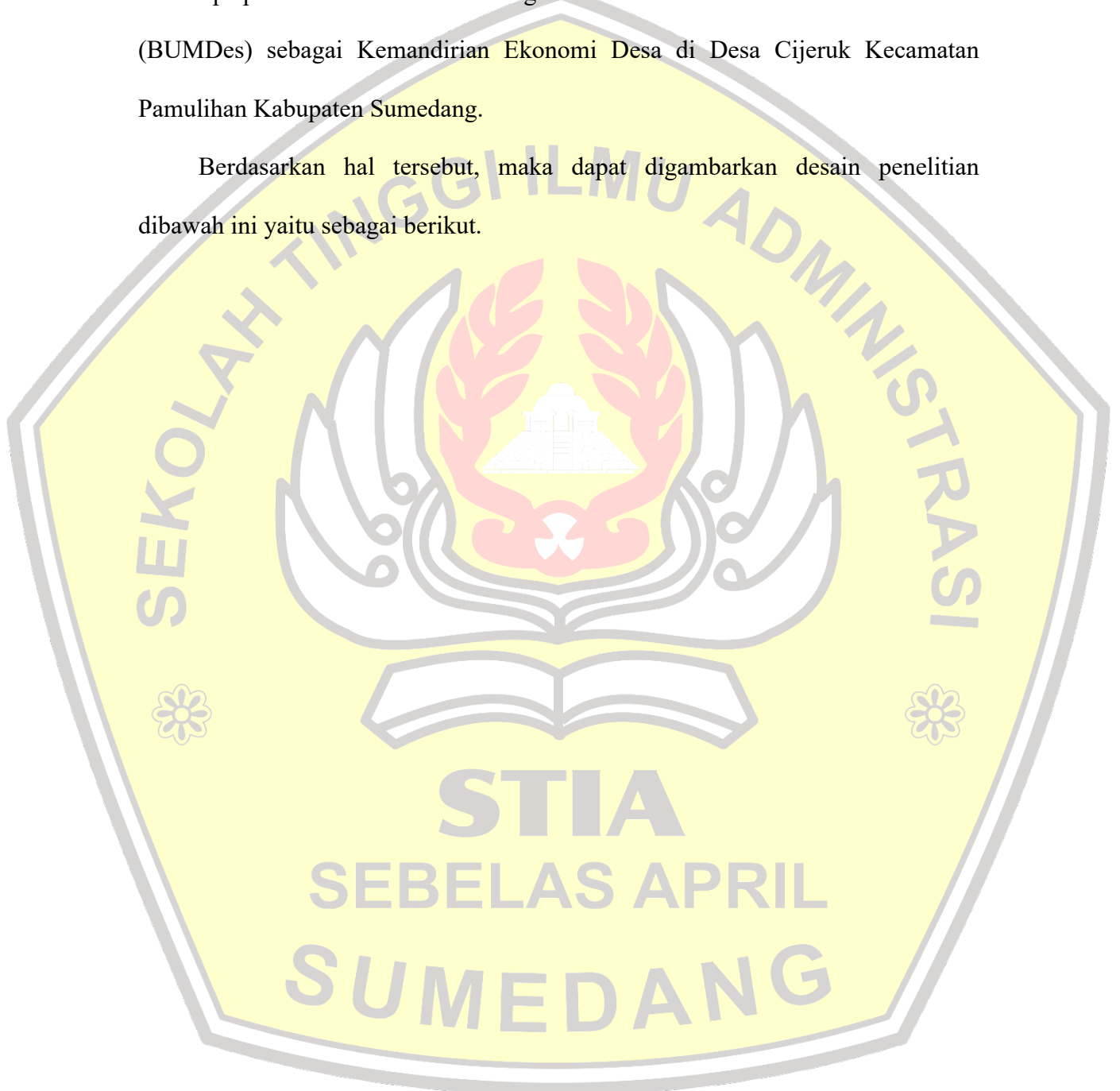
Paradigma penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah paradigma Konstruktivisme. Menurut Creswell (2014:32), paradigma konstruktivisme sosial individu-individu berusaha memaknai makna-makna yang beragam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami kejadian atau peristiwa sosial yang merupakan karakteristik dari paradigma konstruktivisme.

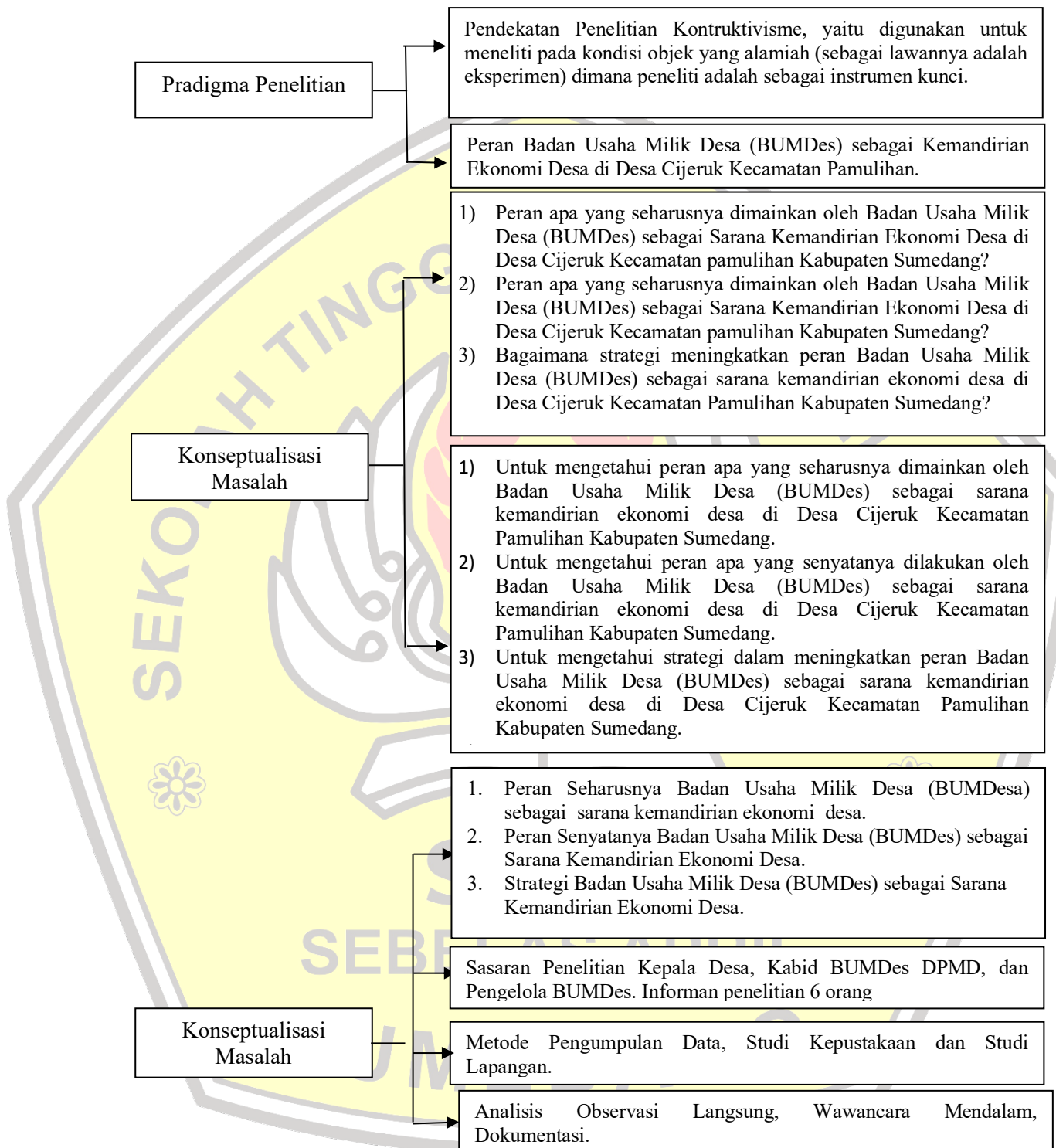
Sedangkan Neuman (2015:115) menjelaskan bahwa paradigma konstruktivisme merupakan upaya untuk memahami dan menjelaskan tindakan sosial yang bermakna.

Dapat disimpulkan bahwa Paradigma Konstruktivisme merupakan sebuah pandangan penelitian yang menempatkan peneliti setara dan sebisa mungkin masuk berinteraksi untuk memahami kondisi di lapangan.

Peneliti melakukan interaksi dengan Kepala Desa dan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai informan yang dapat memberikan informasi terhadap penelitian ini untuk mengetahui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Kemandirian Ekonomi Desa di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan desain penelitian dibawah ini yaitu sebagai berikut.





Gambar 3.1 : Desain Penelitian

Sumber : Hasil Penelitian 2021

B. Sasaran dan Informan Penelitian

1. Sasaran Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu berhadapan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa manusia, benda maupun aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian dimana suatu masalah dapat untuk keseluruhan karakter objek, penelitian ini disebut objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tapi Spradey yang dikutip oleh Sugiyono (2016: 48) dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu “tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Objek dan informan penelitian kualitatif menjelaskan objek penelitian yang menjadi fokus dan lokus penelitian ini adalah Kepala Desa Cijeruk, Ketua BPD Desa Cijeruk, pengelola BUMDes Desa Cijeruk, dan Kepala Bidang BUMDes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang .

2. Informan Penelitian

Penelitian dalam rangka memperoleh informasi yang akurat serta data diperoleh dari informasi serta sampel. Informan adalah pegawai yang benar-benar memahami permasalahan dengan *argument* bahwa mereka mengetahui banyak mengenai fenomena yang terjadi dilapangan, sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan *Sampling Purposive*, menurut Sugiyono (2016: 9) adalah: ”*Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan

tertentu.” Dengan demikian, dalam penelitian ini yang yang dijadikan sumber data adalah mereka mereka yang ada hubungannya dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- a. Otoritas yang dimiliki oleh informan terutama yang berkaitan dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- b. Dianggap memiliki informasi yang banyak mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.
- c. Memiliki keterkaitan, baik secara individu maupun kelompok organisasi tersebut, mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang.

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Penentuan Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah Orang
a.	Kepala Desa	1 orang
b.	Ketua BPD	1 orang
c.	Direktur BUMDes	1 orang
d.	Sekretaris BUMdes	1 orang
e.	Pelaksana/anggota BUMDes	1 orang
f.	Kabid BUMDes DPMD	1 orang
	Jumlah	6 orang

Sumber: Hasil Penelitian,2021

Penyusun mengambil sejumlah 6 orang di atas berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan berkompeten dan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pekerjaan tiap pegawai baik secara keseluruhan maupun sebagian tergantung tufoksi dan tingkat wewenang serta tanggung jawabnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang metode yang digunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur, buku-buku ilmiah, laporan-laporan, arsip serta dokumen-dokumen tertulis, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yang dapat menunjang kelancaran pencarian data.
2. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dilapangan, dengan cara:
 - a. Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam proses kerja.
 - b. Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulam data dengan cara meminta penjelasan kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, mendalam serta terarah sesuai dengan pedoman wawancara.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data berupa rekaman hasil wawancara, photo-photo, catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil wawancara dan observasi.
- d. Triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan menggunakan triangulasi, sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

D. Prosedur Pengolahan Data

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu pada operasi dasar yang menghasilkan keluaran penting yang mengutip dari Model Miles and Huberman (2014: 12) yaitu sebagai berikut.

1. *Data reduction* (Reduksi data);

Data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

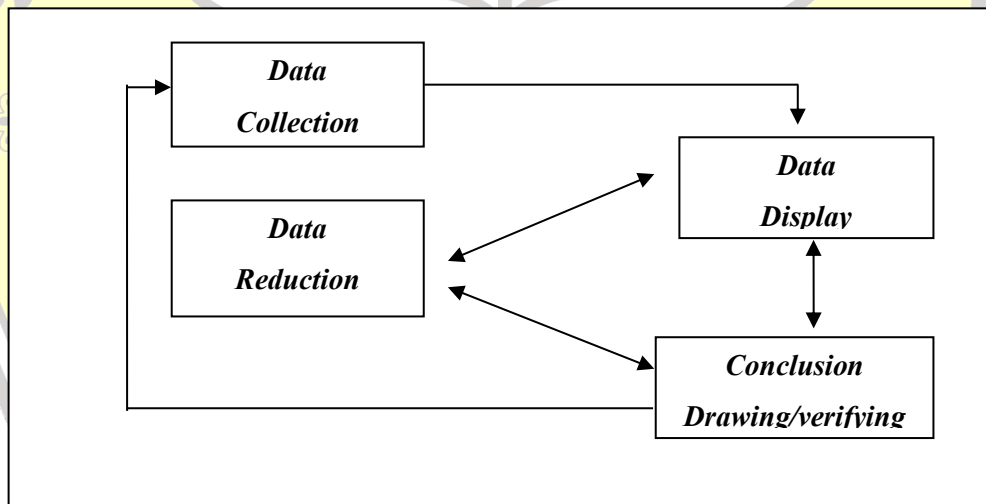
2. *Data Display* (Penyajian data);

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchat dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut,

maka data terorganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi); Kesimpulan dalam penelitian yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Adanya temuan berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Berdasarkan uraian di atas, maka analisis data tersebut di atas oleh Sugiyono (2016: 247) digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2: Bagan Pengolahan Data

Sumber: Hasil Penelitian 2021

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan sebagai Sarana Kemandirian Ekonomi Desa maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Peran seharusnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan sebagai Sarana Kemandirian Ekonomi Desa diharapkan dapat membantu meningkatkan PADes bagi Desa Cijeruk dengan menjadi fasilitas usaha desa. Diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, mengembangkan potensi dan kualitas sumberdaya manusia, hingga dapat meningkatkan aset desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Peran senyatanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cijeruk Kecamatan Pamulihan membantu meningkatkan PADes bagi Desa dengan menjadi fasilitas usaha desa, berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Cijeruk Kecamatan Pamulihan. Namun ternyata BUMDes belum dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi dan kualitas sumberdaya manusia, dan belum juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan aset desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat. BUMDes memang telah berperan aktif dalam memperluas lapangan pekerjaan

di Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan, namun belum nampak adanya kontribusi besar dalam memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Cijeruk.

3. Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa adalah BUMDes telah melakukan berbagai strategi untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang diharapkan menjadi penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Cijeruk, terutama mereka yang merupakan pengrajin bambu kemudian difasilitasi untuk pemasarannya sebagai bagian dari usaha desa yang mampu memperluas lapangan pekerjaan, produktif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki desa, hingga dapat meningkatkan pendapatan desa, masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, serta mampu mengembangkan potensi dan kualitas SDM dengan optimal.

B. Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, peneliti mencoba mengajukan saran-saran yang kiranya dianggap perlu untuk dipertimbangkan sebagai bahan masukan antara lain, yaitu:

1. BUMDes perlu dibina untuk dapat menjalankan peran seharusnya sebagai Sarana Kemandirian Ekonomi Desa yang disesuaikan dengan kebutuhannya, termasuk di dalamnya adalah perlu adanya pengarahan, pelatihan, serta peningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang akan mengelola BUMDes nantinya. Selain itu, perlu adanya dukungan penanaman modal yang memadai

sebagai langkah awal bagi BUMDes dalam menjalankan usahanya, dukungan pemerintah Desa yang utuh, kerjasama dengan *stakeholder* serta sumber manfaat lainnya guna dapat menghasilkan produk unggulan yang tidak akan menyialip atau bahkan mematikan usaha yang telah ada dan dibangun masyarakat melainkan ikut serta dalam mengembangkan produk yang telah hadir sebelumnya.

2. Peran senyatanya bagi BUMDes Desa Cijeruk yang saat ini aktivitasnya sedikit terhambat akibat pandemi, sebetulnya merupakan suatu tantangan dimana ketangguhan, kreativitas dan sumber daya pengelola BUMDes serta masyarakat diharapkan muncul menjadi solusi. Walau kegiatan yang sebelumnya dilakukan terhambat, alangkah baiknya untuk tetap dilanjutkan untuk menghindari hiatus BUMDes.
3. BUMDes melakukan berbagai strategi untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang diharapkan menjadi penyedia lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Cijeruk, terutama mereka yang merupakan pengrajin bambu kemudian difasilitasi untuk pemasarannya. Lebih dari itu, langkah BUMDes dalam memfasilitasi mobilitas pemasaran produk harus di barengi dengan adanya kerjasama relasi tetap agar produk dapat diproduksi secara terus menerus kepada disributor.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadun. 2011. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- . 2007. *Administrasi Perusahaan Negara*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara. (2018). *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Herlianto. 2017. *Manajemen keuangan desa*. Yogyakarta Gosyen Publishing
- Indradi,sjamsiar 2016. *Dasar-dasar dan Teori Administrasi Publik*. Jawa Timur: Intrans Publising.
- Molcong, J. Lexy. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Iskandar, Jusman. 2005. *Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*. Bandung: Puspaga.
- Silalahi, Ulbert. 2016. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- STIA Sebelas April Sumedang, 2021. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Sumedang : STIA Sebelas April Sumedang.
- Horoepoetri, Arimbi dan Santosa. 2013. *Peran Sera Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Ibrahim. 2018. *Manajemen Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hermayanty, I. ., & Yuliyanti. (2020). PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public Administration (JRPA)*, 5(2), 24-35. Retrieved from <https://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/50>
- Atmadja. 2017. *Pengelolaan keuangan desa*. Jakarta: Rajawali Pers
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Sukarna. 1989. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Nasution, Farida Hanum. 2016. *Peran Administrasi Perkantoran Dalam Dunia Bisnis*. *Jurnal Wara*, (19)2, 3.

Herabudin. 2010. *Ilmu Alamiah Dasar*. Bandung. CV Pustaka Setia

Nicholas Henry. 1988. *Administrasi Negara Dan Masalah Kenegaraan / Terjemahan Luciana D.Lontoh*. Jakarta : Rajawali

Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Edisi Keenam). Jakarta: Rajawali Grafindo.

Thoha, Miftah. 2012. *Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Thafa Media ISBN.

Yulianti. 2020. *Peran Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Sumedang*. Skripsi. Sumedang: Universitas Sebelas April Sumedang.

Muhtarom, Abid. 2016. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Desa di Kabupaten Lamongan*. Skripsi. Lamongan: Universitas Islam Lamongan.

Haryadi. 2018. *Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelataran di Desa Matang Lama Kecamatan Malang Kabupaten Bintan)*. Skripsi. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.

Miles and Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis and Methods Sourcebook*. USA: Sage Publication.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Winardi. 2010. *Entrepreneur & Entrepreneurship*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dokumen-dokumen

1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dan Peraturan Pemerintah.
2. Permen Desa PDTT (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Nomor 4 tahun 2015.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah. Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang BUMDes.
6. Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurus, Pengelola Dan Pembubaran BUMDes.

